

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hasil Penelitian Terdahulu

1. Lasro Dearma Br Simbolon, dkk. - Universitas Negeri Medan (2025)
“Strategi Holistik Penguatan Ideologi Pancasila: Sinergi Pendidikan, Keteladanan Elite, dan Internalisasi Nilai”

Secara historis, perjalanan implementasi Pancasila sebagai ideologi negara menunjukkan dinamika yang kompleks dan mengalami fluktuasi yang signifikan. Pada berbagai periode pemerintahan, nilai-nilai luhur Pancasila sering kali diinterpretasikan secara sempit, diselewengkan, dan dimanipulasi untuk kepentingan politik praktis dan legitimasi kekuasaan rezim yang berkuasa (Azikin, 2018). Pada masa Orde Baru, misalnya, Pancasila digunakan sebagai alat legitimasi kekuasaan yang sentralistik dan represif melalui program P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila), sementara di era Reformasi, sebagai reaksi balik terhadap masa lalu, Pancasila justru mengalami marginalisasi, dianggap sebagai produk Orde Baru, dan dianggap kehilangan relevansi praktisnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Azikin, 2018; Sucipto & Najicha, 2024). Tantangan kontemporer yang paling signifikan dan multidimensi datang dari arus globalisasi dan revolusi digital. Globalisasi membawa serta nilai-nilai individualisme, konsumerisme, materialisme, dan liberalisme ekstrem yang berpotensi menggerus semangat persatuan, kegotongroyongan, dan keadilan sosial yang menjadi jiwa Pancasila (Eliza et al., 2024). Selain itu, lemahnya pemahaman substantif

masyarakat, terutama di kalangan generasi muda, terhadap esensi dan filsafat nilai-nilai Pancasila, serta ketidakmampuan menransformasikannya dalam konteks kekinian, menjadi faktor penghambat internal yang serius dan mengkhawatirkan (Sitanggang, 2024). Tantangan ini diperparah dengan maraknya hoaks, politik identitas, dan radikalisme yang mengancam persatuan nasional (Eliza et al., 2024).

2. Nalar Az-zahra, Dkk. - Universitas Pendidikan Indonesia (2022)

“Penguatan Ideologi Pancasila Di Kalangan Mahasiswa Dan Masyarakat”

Ideologi Pancasila seharusnya menjadi sebuah garis pandangan bagi setiap warganegaranya menghadapi fenomena yang terjadi baik dari luar maupun dalam negeri. Dalam membumikan Pancasila 5 pokok yang menjadi tantangan menurut Anggota BPIP Romo, 2019 yaitu (1) Pemahaman Pancasila, (2) eksklusivisme sosial yang terkait derasnya arus globalisasi sehingga mengarah kepada menguatnya kecenderungan politisasi identitas, dan menguatnya gejala polarisasi dan frgamentasi sosial yang berbasis SARA, (3) Kesenjangan social, (4) pelembagaan Pancasila di mana lemahnya institusionalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kelembagaan politik, ekonomi dan budaya serta masih lemahnya wawasan ideologi Pancasila di kalangan penyelenggara Negara, (5) Keteladanan Pancasila (Nurgiansah, 2022).

3. Daud Rotama - Universitas Sumatera Utara (2020)

“Peranan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Penanggulangan Radikalisme Di Sumatera Utara (Studi Kasus Keterlibatan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Sumatera Utara Dalam Penanganan Peristiwa Terorisme DiSibolga)”

Provinsi Sumatera Utara adalah salah satu daerah yang telah mengalami peristiwa radikalisme berujung bom bunuh diri tepatnya di Kota Sibolga meskipun daerah tersebut sejatinya merupakan daerah yang majemuk. Penelitian dilakukan demi mengetahui pemahaman apakah yang dimiliki instansi tentang radikalisme. Bagaimanakah bentuk peranan yang dimiliki oleh instansi dalam penanggulangannya? Adakah tantangan atau hambatan yang dihadapi saat melaksanakan pekerjaannya di masyarakat? Teori yang dipakai untuk menganalisis adalah teori akar radikalisme dan cara-cara penanganannya dari Ibrahim, Dini Wulansari, Novendra Hidayat, Djamaluddin Ancok, Muhammad Imarah, dan Haryatmoko untuk mengetahui dasar kemunculan radikalisme sebagai sebuah ideologi, faktor-faktor utama dalam penyebaran paham radikal, dan pengaruhnya bagi masyarakat. Begitu pula dengan teori penanganan radikalisme yang bertujuan untuk memahami peranan pemerintah dan masyarakat dalam menanggulangi kasus-kasus radikalisme serta kendalanya.

4. Nur Wasiah Adiwiyono - Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2018)

“Kedudukan Kelembagaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia (Analisis Yuridis Undang-

Undang Nomor 39 Tahun 2008 Dan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018)”

Sebagai lembaga pencegahan pelanggaran atau masalah yang berkaitan dengan ideologi Pancasila. Suatu lembaga yang memiliki kewenangan luas dan cukup besar dalam sistem tata negara di Indonesia, oleh karena itu pembentukan lembaga tersebut harus sesuai dengan dasar hukum dan latar belakang pembentukan serta pertanggung jawaban lembaga negara ini sesuai dengan tugas dan fungsi yang diembannya terhadap negara dan masyarakat. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif-yuridis dan library reasearch dengan melakukan pengkajian terhadap norma-normahukum, buku buku, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul skripsi ini serta penanganan terhadap masalah-masalah tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara status Badan Pembinaan Ideologi Pancasila merupakan lembaga independen atau lebih disebut sebagai state auxiliaries atau derivative organ dengan tugas dan wewenang secara khusus dibentuk oleh Presiden untuk membantu Pemerintah mencapai tujuan Negara yaitu menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

B. Tinjauan Teoritis

1. Implementasi

Menurut Mulyasa (2010:173) dalam Ina Magdalena, dkk (2021) Analisis Implementasi Program Kegiatan Mengajar, Administrasi Sekolah dan Mengikuti Kegiatan Sekolah di SD Negeri 01 Sebetung

Menyala. Jurnal Pengabdian Sosial dan Kemanusiaan Volume. 2, Nomor. 1 Tahun 2025, implementasi merupakan suatu proses penerapan ide, konsep, kebijakan atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai dan sikap. Pengertian implementasi menurut Mclaughlin dan Schubert yang dikutip oleh Nurdin & Basyiruddin (2003:70) dalam Jurnal Ina Magdalena, dkk (2021) secara sederhana implementasi diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Implementasi merupakan aktivitas yang saling menyesuaikan. Implementasi merupakan sistem rekayasa. Pengertian-pengertian tersebut memperlihatkan bahwa kata implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekedar aktivitas tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

Berdasarkan sintesis pemikiran para ahli, dapat disimpulkan bahwa implementasi bukan sekedar proses teknis pelaksanaan, melainkan sebuah ekosistem aktivitas yang kompleks dan sistematis. Dalam konteks Program Penguatan Ideologi Pancasila pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Balangan, implementasi didefinisikan melalui tiga pilar utama:

- a. Transformasi Konsep ke Tindakan Praktis: Implementasi merupakan proses penerjemahan kebijakan penguatan ideologi dari tataran ide (normatif) ke dalam tindakan nyata yang terukur. Keberhasilannya

ditandai dengan adanya perubahan nyata pada aspek kognitif (pengetahuan), psikomotorik (keterampilan), dan afektif (nilai dan sikap) sasaran program.

- b. Mekanisme Sistemik yang Terencana: Sebagai sebuah "sistem rekayasa", implementasi program di Kesbangpol Balangan harus dipandang sebagai kegiatan yang terorganisir dan dilakukan secara sungguh-sungguh. Hal ini menuntut adanya acuan norma, prosedur standar, dan perencanaan matang agar setiap aksi yang dilakukan bermuara pada pencapaian tujuan penguatan ideologi secara efektif.
- c. Aktivitas Adaptif (Mutual Adaptation): Implementasi melibatkan proses penyesuaian yang dinamis antara karakteristik program dengan realitas di lapangan. Dengan demikian, pelaksanaan program di Kesbangpol Balangan merupakan sebuah interaksi aktif yang menuntut keselarasan antara sumber daya, kebijakan, dan kondisi sosial masyarakat demi mencapai stabilitas ideologi Pancasila.

Secara ringkas: Implementasi Program Penguatan Ideologi Pancasila pada Kesbangpol Balangan adalah suatu mekanisme tindakan yang terencana dan sistematis untuk mentransformasikan nilai-nilai Pancasila menjadi perilaku nyata masyarakat melalui proses adaptasi sistem yang berlandaskan pada norma hukum dan tujuan nasional.

2. Implementasi Kebijakan

Secara ontologis, subject matter studi implementasi dimaksudkan untuk memahami fenomena mengapa suatu kebijakan publik gagal diimplementasikan disuatu lokasi/daerah tertentu. Upaya untuk

memahami fenomena implementasi tersebut pada akhirnya dimaksudkan untuk dapat memetakan faktor-faktor apa saja (variabel penjelas) yang mempengaruhi munculnya berbagai fenomena implementasi tadi, apa sebenarnya faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau pun kegagalan implementasi suatu kebijakan (Tresiana dan Duadji, 2020).

Pelopori implementasi kebijakan publik yaitu, Presman dan Wildavsky tahun 1970-an melakukan studi untuk memahami mengapa implementasi berbagai program yang dirancang pemerintah pusat cenderung gagal diimplementasikan oleh pemerintah negara bagian, dan sampai hari ini fenomena tersebut masih terus berulang. Berbagai kebijakan dan program pembangunan yang dirancang secara baik oleh pemerintah, ketika diimplementasikan jauh dari harapan. Fakta yang ada menunjukkan kondisi ideal yang tercantum dalam dokumen kebijakan sering mandeg ketika berhadapan dengan realita lapangan. Keberadaan dan pentingnya implementasi kebijakan tersajikan di awal pada forum the American Association for the Advancement of Science pada tahun 1970 (Akib dan Tarigan, 2008; Rabin, 2001). Pakar dari Indonesia, VVahab (1991) dan beberapa penulis menempatkan tahap implementasi kebijakan pada posisi yang berbeda, namun pada prinsipnya setiap kebijakan publik selalu ditindaklanjuti dengan implementasi kebijakan. Implementasi dianggap sebagai wujud utama dan tahap yang sangat menentukan dalam proses kebijakan (Birkland, 2001; Heineman et al., 1997; Ripley dan Franklin, 1986; Wibawa dkk., 1994). Pandangan tersebut dikuatkan dengan pernyataan Edwards III (1984) bahwa tanpa implementasi yang

efektif keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan. Implementasi kebijakan merupakan aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan output atau outcomes bagi masyarakat.

Pentingnya implementasi kebijakan, dilandasi beberapa alasan mengacu pada pandangan para pakar bahwa setiap kebijakan yang telah dibuat harus diimplementasikan. Oleh karena itu, implementasi kebijakan diperlukan karena berbagai alasan atau perspektif. Edwards III (1984), berdasarkan perspektif masalah kebijakan, implementasi kebijakan diperlukan karena adanya masalah kebijakan yang perlu diatasi dan dipecahkan dengan mengutamakan faktor-faktor apa yang mendukung dan menghambat keberhasilan implementasi kebijakan. Berdasarkan pertanyaan retorik tersebut dirumuskan empat faktor sebagai sumber masalah sekaligus prakondisi bagi keberhasilan proses implementasi, yakni komunikasi, sumber daya, sikap birokrasi atau pelaksana, dan struktur organisasi termasuk tata aliran kerja birokrasi. Sementara Grindle (1980) dan Quade (1984) mengedepankan alasan konfigurasi dan sinergi dari tiga variabel yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan, yakni hubungan segi tiga variabel kebijakan, organisasi, dan lingkungan kebijakan. Harapan itu perlu diwujudkan agar melalui pemilihan kebijakan yang tepat masyarakat dapat berpartisipasi dalam memberikan kontribusi yang optimal untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Selanjutnya, ketika sudah ditemukan kebijakan yang terpilih

perlu diwadahi oleh organisasi pelaksana, karena di dalam organisasi terdapat kewenangan dan berbagai jenis sumber daya yang mendukung pelaksanaan kebijakan atau program. Sedangkan penciptaan situasi dan kondisi lingkungan kebijakan diperlukan agar dapat memberikan pengaruh, meskipun pengaruhnya seringkali bersifat positif atau negatif. Karenanya, jika lingkungan berpandangan positif terhadap suatu kebijakan maka akan menghasilkan dukungan positif sehingga lingkungan berpengaruh terhadap kesuksesan implementasi kebijakan. Sebaliknya, jika lingkungan berpandangan negatif maka akan terjadi benturan sikap sehingga proses implementasi terancam akan gagal. Lebih daripada ketiga aspek tersebut perlu pula dipertahankan kepatuhan kelompok sasaran kebijakan sebagai hasil langsung dari implementasi kebijakan yang menentukan efeknya terhadap masyarakat.

3. Program

Dalam konteks kebijakan publik, program adalah instrumen kerja yang disusun oleh instansi pemerintah (baik pusat maupun daerah) yang terdiri dari serangkaian kegiatan sistematis untuk mencapai tujuan strategis nasional atau daerah.

Ayu Diana, Nizar, Ratna Sari (2023) Evaluasi Program Pendidikan. Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII) Vol. 1, Ada dua pengertian untuk istilah “program”, yaitu pengertian secara khusus dan umum. Menurut pengertian secara umum, program dapat diartikan sebagai rencana. Secara khusus, jika seorang siswa ditanya oleh guru, apa programnya sesudah lulus dalam menyelesaikan pendidikan di sekolah yang diikuti,

maka arti program dalam kalimat tersebut adalah rencana atau rancangan kegiatan yang akan dilakukan setelah lulus. Rencana ini mungkin berupa keinginan untuk melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi, mencari pekerjaan, membantu orang tua sehingga akan memberi jawaban bahwa program masa depan menunggu keputusan orang tuannya.

Poin krusial dari pemikiran Diana dkk. adalah bahwa sebuah program sering kali bergantung pada keputusan otoritas atau pemangku kepentingan. Sebagaimana siswa yang menunggu keputusan orang tua, implementasi program di Kesbangpol Balangan juga merupakan perwujudan dari keputusan politik dan administratif Pemerintah Daerah.

Seperti yang dikutip oleh Owen dari Smith (1989:26) dalam jurnal Alfie Ridho, dkk (2023) mengatakan bahwa: *“Defines a program as: a set of planned activities directed toward bringing about specified change (s) in an identified and identifiable audience. This Suggests that a program has two essential components: a documented plan; and action consistent with the documentation contained in the plan”*. Dapat diartikan bahwa program adalah seperangkat kegiatan rencana yang diarahkan untuk membawa perubahan yang ditentukan dan diidentifikasi melalui audiens yang teridentifikasi. Dalam hal ini menunjukkan bahwa program memiliki dua komponen penting, yaitu rencana yang terdokumentasikan, dan tindakan yang konsisten dengan dokumentasi yang terkandung dalam rencana.

Dalam mengkaji implementasi kebijakan di daerah, perspektif yang dikemukakan oleh Smith (1989) sebagaimana dikutip oleh Owen dalam

Alfie Ridho, dkk (2023), memberikan batasan yang tegas mengenai anatomi sebuah program. Smith mendefinisikan program sebagai "a set of planned activities directed toward bringing about specified change(s) in an identified and identifiable audience." Secara konseptual, definisi ini menggeser pemahaman program dari sekadar rutinitas birokrasi menjadi sebuah instrumen perubahan yang sengaja dirancang.

Jika ditarik ke dalam lokus penelitian pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Balangan, maka narasi tersebut dapat dibedah ke dalam dua komponen esensial:

a. Rencana yang Terdokumentasi (Documented Plan)

Komponen pertama menekankan bahwa Program Penguatan Ideologi Pancasila tidak boleh hadir dalam bentuk gagasan abstrak semata. Program tersebut harus tertuang dalam dokumen resmi (seperti Renja atau RKA Kesbangpol Balangan) yang memuat:

- 1) Identifikasi Audiens: Siapa sasaran perubahan tersebut? (Misalnya: pelajar, aparatur desa, atau organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Balangan).
- 2) Perubahan yang Spesifik: Apa target perubahan yang diinginkan? (Misalnya: peningkatan indeks demokrasi atau penurunan potensi konflik horizontal).

Tanpa dokumentasi yang jelas, upaya penguatan ideologi di Kabupaten Balangan akan kehilangan landasan yuridis dan administratifnya.

b. Tindakan yang Konsisten (Consistent Action)

Komponen kedua adalah ujian sesungguhnya dari sebuah implementasi, yaitu konsistensi antara apa yang tertulis dalam dokumen dengan apa yang dilaksanakan di lapangan. Smith menegaskan bahwa keberadaan dokumen rencana tidak bermakna apa-apa tanpa adanya tindakan yang selaras.

Dalam konteks Badan Kesbangpol Kabupaten Balangan, hal ini berarti:

- 1) Setiap sosialisasi, seminar, maupun pembinaan karakter yang dilakukan harus merupakan pengejawantahan langsung dari rencana yang telah disusun.
- 2) Konsistensi ini menjadi parameter utama untuk menilai apakah Badan Kesbangpol telah menjalankan fungsi "implementasi" dengan benar atau hanya sekedar melakukan pengguguran kewajiban administratif.

4. Ideologi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ideologi didefinisikan sebagai kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Ideologi juga diartikan sebagai cara berpikir seseorang atau suatu golongan. Ideologi dapat diartikan paham, teori, dan tujuan yang merupakan satu program sosial politik (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008: 517).

Istilah ideologi berasal dari kata idea, yang artinya gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita; dan logos yang berarti ilmu. Ideologi secara etimologis, artinya ilmu tentang ide- ide (the science of ideas),

atau ajaran tentang pengertian dasar (Kaelan, 2013: 60-61) dalam buku ajar mata kuliah wajib umum Pancasila (2016: 116). Secara fundamental, pemahaman mengenai implementasi program penguatan ideologi harus dimulai dengan membedah akar kata dari "ideologi" itu sendiri, secara etimologis ideologi berasal dari perpaduan dua kata Yunani, yaitu *idea* dan *logos*.

- a. *Idea*: Merujuk pada gagasan, konsep, pengertian dasar, serta cita-cita. Dalam konteks bernegara, *idea* bukan sekadar khayalan, melainkan sebuah rancangan besar mengenai bagaimana suatu bangsa ingin dibentuk.
- b. *Logos*: Diartikan sebagai ilmu. Dengan demikian, ideologi secara harafiah adalah the science of ideas atau ilmu tentang ide-ide, yang mencakup ajaran mengenai pengertian-pengertian dasar yang menjadi kompas kehidupan.

Dengan memahami bahwa ideologi adalah sebuah "ilmu tentang pengertian dasar", maka program-program yang dijalankan oleh Badan Kesbangpol—seperti sosialisasi wawasan kebangsaan maupun pembinaan karakter—bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan sebuah proses pendidikan ideologis yang sistematis untuk menanamkan pemahaman yang mendalam (ajaran) mengenai jati diri bangsa kepada audiens di Kabupaten Balangan.

5. Pancasila

Menurut Notonagoro (1977) dalam Jesika Indriani, dkk (2024) Konsensus, Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi Vol. 1

No. 4 (2024), Pancasila adalah dasar falsafah negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia yang mengatur seluruh aspek kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Notonagoro menekankan bahwa Pancasila bukan hanya sekadar norma hukum, tetapi juga pedoman moral dan etika bagi masyarakat. Dalam diskursus mengenai ideologi nasional, pemikiran Notonagoro (1977) sebagaimana dikutip oleh Jesika Indriani, dkk (2024), memberikan pemahaman mendalam mengenai kedudukan ganda Pancasila. Notonagoro menegaskan bahwa Pancasila adalah dasar falsafah negara (*filosofische grondslag*) sekaligus pandangan hidup bangsa (*weltanschauung*) yang mengatur seluruh aspek kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Setiap sila memiliki makna yang saling terkait dan membentuk kerangka nilai yang menyeluruh, sehingga penerapannya dapat mempengaruhi perilaku masyarakat dan proses pembangunan nasional. Konsep "dasar falsafah" ini merupakan landasan bagi setiap kebijakan penguatan ideologi. Sebagai pandangan hidup, Pancasila berfungsi sebagai filter budaya dan sosial bagi masyarakat Balangan. Di tengah keberagaman dan dinamika sosial di Kabupaten Balangan, Pancasila hadir sebagai pemersatu yang memberikan kerangka berpikir bagi masyarakat dalam menyikapi perbedaan. Implementasi program yang dilakukan oleh Kesbangpol tidak hanya bertujuan untuk kepatuhan administratif, tetapi untuk memastikan nilai-nilai Pancasila tetap menjadi jiwa dari setiap aktivitas kemasyarakatan. Poin krusial dalam pemikiran Notonagoro adalah penegasannya bahwa Pancasila

bukan sekadar norma hukum yang bersifat memaksa dari atas (top-down). Lebih dari itu, Pancasila adalah pedoman moral dan etika.

Sementara itu, menurut Kisaranoto (1990-an), Pancasila dipandang sebagai ideologi yang dinamis, yaitu ideologi yang mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa mengubah nilai dasarnya. Kisaranoto menekankan bahwa penguatan ideologi Pancasila harus dilakukan melalui pendidikan, sosialisasi, dan internalisasi nilai-nilai Pancasila agar masyarakat tidak hanya memahami secara teoritis tetapi juga mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari.

Pandangan ini menegaskan bahwa Pancasila berfungsi sebagai pedoman hidup, dasar moral, dan arah kebijakan publik, sehingga penguatan ideologi Pancasila memerlukan pendekatan yang sistematis dan menyeluruh.

6. Ideologi Pancasila

Menurut Octojo Oesman (1993/1994) dalam Ahmad Muhamad Musain Nasoha, dkk (2024) Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa: Perwujudan Nilai Budaya dan Konsensus Dalam Keberagaman Indonesia, Jurnal Hukum Indonesia Volume. 1 Nomor. 3 Tahun 2024, Ideologi pancasila berperan sebagai ideologi nasional, maka perlu kajian bagaimana upaya yang harus dilaksanakan agar ideologi senantiasa dapat berperan sebagai faktor yang berpengaruh atau integratif. Oleh karena itu, perlu memiliki tiga dimensi, yaitu:

- a. Dimensi idealis.
- b. Realis,
- c. Fleksibilitas.

Dalam upaya memperkuat kedudukan Pancasila sebagai ideologi nasional, Oetojo Oesman (1993/1994) dalam diskursus yang kembali ditegaskan oleh Nasoha dkk. (2024), menekankan bahwa Pancasila harus mampu berfungsi sebagai faktor integratif. Artinya, ideologi tidak boleh hanya sekadar menjadi slogan formal kenegaraan, melainkan harus hadir sebagai kekuatan pemersatu yang mampu mengikat keberagaman bangsa.

Agar Pancasila senantiasa relevan dan memiliki daya pengaruh yang kuat (faktor determinan) dalam kehidupan berbangsa, maka implementasi program penguatan ideologi pada instansi seperti Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Balangan harus berpijak pada tiga dimensi utama ideologi terbuka, yaitu:

a. Dimensi Idealitas

Dimensi ini berkaitan dengan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila (Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan) yang bersifat sistematis, rasional, dan menyeluruh. Dalam konteks penguatan ideologi di Kabupaten Balangan, dimensi idealitas memberikan landasan bahwa program-program yang dijalankan oleh Kesbangpol harus mampu menumbuhkan harapan (optimisme) dan cita-cita luhur di tengah masyarakat. Hal ini memastikan bahwa masyarakat tidak kehilangan arah dalam menghadapi arus globalisasi, karena memiliki "bintang pemandu" yang jelas dalam kehidupan bernegara.

b. Dimensi Realitas

Dimensi realitas mengharuskan sebuah ideologi untuk mampu mencerminkan serta hidup dalam realitas kehidupan masyarakatnya. Implementasi program penguatan ideologi oleh Kesbangpol Balangan tidak boleh bersifat "utopis" atau terawang-awang. Sebaliknya, nilai-nilai Pancasila harus mampu diaktualisasikan dalam konteks kearifan lokal masyarakat Balangan. Program tersebut harus menyentuh persoalan nyata—seperti kerukunan antarumat beragama, penyelesaian konflik sosial, dan penguatan nilai gotong royong sehingga Pancasila dirasakan manfaatnya secara konkret sebagai solusi atas problematika di daerah.

c. Dimensi Fleksibilitas

Dimensi ini menunjukkan bahwa Pancasila memiliki keluwesan yang memungkinkannya untuk berkembang pemikirannya tanpa kehilangan jati diri esensialnya. Dalam menjalankan fungsinya, Kesbangpol Kabupaten Balangan perlu mengadopsi dimensi fleksibilitas ini dengan cara melakukan inovasi pada metode sosialisasi dan internalisasi ideologi. Penguatan Pancasila tidak lagi hanya dilakukan melalui penataran konvensional yang kaku, melainkan melalui pendekatan yang adaptif terhadap perkembangan zaman, teknologi informasi, dan karakteristik generasi muda (Gen Z dan Milenial) di Kabupaten Balangan.

7. Konsep penguatan ideologi Pancasila

Lasro Dearma Br Simbolon, dkk. (2025), Strategi Holistik Penguatan Ideologi Pancasila: Sinergi Pendidikan, Keteladanan Elite, dan

Internalisasi Nilai, *Journal of Education and Learning Evaluation* Vol. 2 No. 2 Desember 2025. Berdasarkan analisis teoritis, penguatan Pancasila sebagai ideologi negara memerlukan pendekatan yang komprehensif dan multidimensi. Teori pendidikan kewarganegaraan menekankan pentingnya internalisasi nilai melalui pendidikan formal, non-formal, dan informal yang berkelanjutan (Sitanggang, 2024). Sementara teori kepemimpinan menegaskan peran strategis elite politik dan tokoh masyarakat dalam memberikan keteladanan implementasi nilai-nilai Pancasila (Azikin, 2018). Teori sosial budaya menggarisbawahi pentingnya reaktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam konteks kekinian melalui revitalisasi praktik-praktik budaya lokal yang sejalan dengan semangat Pancasila, seperti gotong royong, musyawarah, dan toleransi (Nasoha et al., 2024). Sedangkan teori komunikasi ideologi menekankan perlunya pengemasan nilai-nilai Pancasila dalam bentuk narasi yang relevan dengan tantangan zaman, serta penggunaan media yang efektif untuk menyampaikannya kepada generasi muda (Eliza et al., 2024).

Pembahasan ketahanan ideologi Pancasila tidak bisa terlepas dari Ketahanan Nasional. Ketahanan nasional sering diterjemahkan dalam bahasa Inggris sebagai national resilience karena dianggap memiliki pengertian yang dinamik, aktif, dan proaktif. Ketahanan nasional merupakan kondisi dinamik suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan. Ketahanan nasional juga mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan, baik itu yang

berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri, baik yang secara langsung maupun yang tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mengejar tujuan dan cita-cita nasionalnya (Suryohadiprojo, 1997: 14). Hal tersebut dapat dimengerti sebab salah satu peran konsepsi ketahanan nasional adalah sebagai metode dan pendekatan komprehensif integral dalam penyelenggaraan kehidupan dan pembangunan nasional (Suryosumarto (1997: 35). Salah satu elemen penting dalam menggapai ketahanan nasional adalah ketahanan ideologi. Untuk kasus di Indonesia, ideologi yang dimaksudkan adalah ideologi Pancasila. Hal tersebut ditegaskan Suryosumarto (1997: 34) dalam kajiannya yang menyebutkan bahwa ketahanan nasional mengandung prinsip dasar pengejawantahan Pancasila dalam segenap aspek kehidupan nasional. Berbicara tentang ideologi Pancasila, suka tidak suka, kita juga harus merujuk pada pidato Ir. Soekarno dalam Sidang BPUPK tanggal 1 Juni 1945. Dalam pidato tersebut ia menegaskan bahwa Pancasila adalah satusatunya ideologi yang mampu menyatukan bangsa Indonesia (Soekarno, 2008). Selain itu, peran Pancasila dalam perdamaian dunia juga memegang peran yang sangat vital karena mampu menjadi ideologi penyeimbang antara sosialisme dan kapitalisme. Hal tersebut sesuai dengan semangat dan cita-cita luhur para pendiri bangsa Indonesia yang menginginkan terwujudnya perdamaian dunia.

C. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini menggunakan Teori David C. Korten (1980): Menurut David C. Korten (dalam Tresiana dan Duadji, 2020) bahwa keberhasilan implementasi mempunyai 3 indikator antara lain: *pertama*, kesesuaian antara program dengan pemanfaat, *kedua*, kesesuaian program dengan organisasi pelaksana, *ketiga*, kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana. Sehingga fokus penelitian ini berfokus pada:

1. Program (*TheProgram*): Rencana penguatan ideologi Pancasila itu sendiri.
2. Organisasi Pelaksana (*TheOrganization*): Badan Kesbangpol Kabupaten Balangan.
3. Kelompok Sasaran (*TheBeneficiaries*): Masyarakat Kabupaten Balangan



Gambar 2. 1
Kerangka Pemikiran

